

THESIS

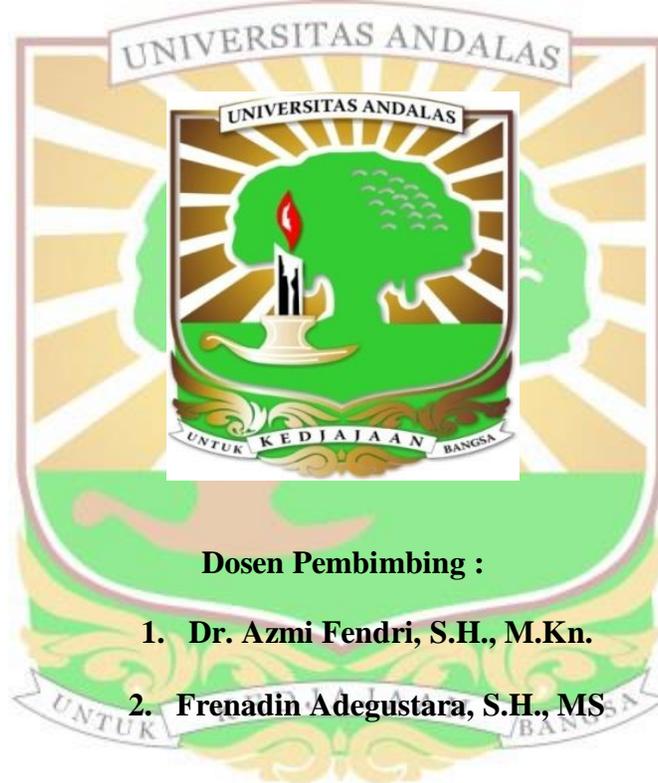
**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM OLEH NOTARIS DI KOTA**

PADANG

Oleh :

DINA SHABRINA

1620122001



Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.**
- 2. Frenadin Adegustara, S.H., MS**

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MENCEGAH
TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM OLEH NOTARIS DI KOTA PADANG**

Dina Shabrina, NIM. 1620122001, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana
Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2018, 98
halaman

ABSTRAK

Kewenangan notaris sangatlah rentan dalam melakukan pelanggaran hukum. Peran majelis pengawas sangat penting guna menjaga profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Penagakan hukum sangat dibutuhkan ketika adanya suatu kesalahan maka akan dijatuhkan sanksi yang harus diberikan kepada notaris yang bermasalah. Hal ini menarik dilakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan permasalahan penelitiannya; Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum oleh Notaris di Kota Padang, Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh Notaris di Kota Padang, dan tindakan apa yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum oleh Notaris di Kota Padang. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis data berupa data sekunder dan data primer. Majelis Pengawas Daerah Kota Padang mengatakan bahwa Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris di Kota Padang adalah Notaris suka menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan tanggal yang dibuatnya akta tersebut dan Notaris sering tidak bertatap muka langsung dengan klien, dalam mencegah terjadinya pelanggaran Hukum oleh Notaris di Kota Padang yaitu dengan adanya sosialisasi dan langsung turun ke lapangan. Tindakan yang dilakukan jika adanya pelanggaran hukum oleh Notaris yaitu menjalankan proses pemeriksaan agar dapat membuktikan apakah Notaris tersebut melakukan pelanggaran atau tidak.

Kata kunci : Peran, Mencegah, Pelanggaran Hukum



THE ROLE OF NOTARY SUPERVISOR ASSEMBLY AREA (MPD) IN PREVENTING LEGAL OFFENSE BY NOTARY IN PADANG

Dina Shabrina, NIM. 1620122001, Notary Magister Study Program, Faculty of Law, Andalas University, 2018, P.98

ABSTRACT

A notary authority is very vulnerable to do a legal offense. The role of Supervisor Assembly Area (MPD) is very important to keep the professionalism of a notary in doing the job. Law enforcement is needed as a sanction will be given to the offended notary while a mistake is made. This things made a research about the role of MPD becomes important. The problem has been found are: 1.What factors do make the legal offended is happened in Padang? 2. What sanction that Supervisor Assembly Area (MPD) has given to Notary who offend the legal in Padang? 3. How is the rule of Supervisor Assembly Area (MPD) in order to prevent the legal offend in Padang? This study is conducted through juridical empirical approach by using primary and secondary data. Supervisor Assembly Area (MPD) argues that the lawlessness in Padang is caused by two things; the notary accepts a job which the date is not suitable with the date of the deed made, and the notary itself did not meet the client face to face. To be relate, it can be seen the basic reasons why Notary tends to do legal offense and code of ethics. The influence of kinship, position, consumerism, and due to weak faith become the most causes of the violence. In favor of preventing the lawlessness by notary in Padang, socialization and plunge to the society is done. An inspection process will be carried out if a law violence is probably do by a notary to prove if the notary do the lawlessness. To be concluded, the role of Supervisor Assembly Area (MPD) can be written as: 1.By doing a controlling prevention—a control which is done before offends are happened by giving socialization and legal counseling. 2. Repressive; supervision is carried out after the issuance of a government decree or after a violation. The Regional Supervisory Assembly (MPD) do a socialization when conducting a legal proceeding made by a Notary.

Keywords: Roles, Prevention, Legal Offense

